

Inkonsistensi Prinsip Taat Hukum Uni Eropa dalam Pembangunan Jembatan Peljesac antara Kroasia dan Bosnia-Herzegovina = Inconsistencies of the European Union's Rule of Law Principle in the Peljesac Bridge's Construction between Croatia and Bosnia-Herzegovina

Gemerlap Bintang Langit, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920573428&lokasi=lokal>

Abstrak

Jembatan Pelješac adalah perangkat infrastruktur transportasi yang dibangun Kroasia dalam rangka menghubungkan wilayah Dubrovnik-Neretva pada daratan utama negara tersebut. Pembangunan jembatan ini melibatkan Uni Eropa sebagai pemberi dana dan Tiongkok sebagai pihak kontraktor. Dibangunnya Jembatan Pelješac di wilayah laut sengketa mengindikasikan Uni Eropa inkonsisten dalam menerapkan prinsip taat hukum pada pendanaan pembangunan proyek tersebut. Skripsi ini bertujuan mengungkap penyebab dari inkonsistensi Uni Eropa dengan menggunakan teori foreign policy analysis Wallace dan Wallace. Melalui teori tersebut, keputusan Uni Eropa untuk mendanai pembangunan Jembatan Pelješac dapat dilihat sebagai hasil dorongan kepentingannya menghadapi variabel sistemik, politik regional, domestik, dan individu dalam pembangunan jembatan ini. Pada level sistemik, ketidak-terlibatan Amerika Serikat di kontestasi power pembangunan infrastruktur mendorong Uni Eropa untuk melihat keterlibatan Tiongkok pada pembangunan Jembatan Pelješac sebagai hal menguntungkan. Pada level politik regional, kondisi politik Semenanjung Balkan Barat membentuk persepsi Uni Eropa bahwa tidak ada aktor yang menentang pembangunan Jembatan Pelješac. Pada level domestik, kepentingan konektivitas kawasan Schengen dan perluasan Jaringan Trans-Eropa mendorong Uni Eropa untuk menanggapi kegunaan pembangunan Jembatan Pelješac secara positif. Pada level individu, latar belakang pribadi aktor-aktor kunci dalam Komisi Eropa mendorong Uni Eropa untuk menanggapi peran dan kontribusi mereka di pembangunan Jembatan Pelješac secara positif. Alhasil, implikasi gabungan dari keempat variabel mendorong Uni Eropa untuk mendanai pembangunan Jembatan Pelješac. Hasil skripsi ini berkontribusi pada pemahaman atas inkonsistensi normative power Uni Eropa.

.....The Pelješac Bridge is a transportation infrastructure project built by Croatia as a means to connect the Dubrovnik-Neretva region with the Croatian mainland. The construction of this bridge involves the European Union as the financier and China as the contractor. The construction of the Pelješac Bridge over disputed waters suggests that the European Union was inconsistent in applying its rule of law principle during the bridge's funding process. This thesis aims to unearth the causes behind this inconsistency by utilising Wallace and Wallace's foreign policy analysis theory. Based on this theory, the European Union's decision to fund the construction of the Pelješac Bridge can be seen as a result of its interests when responding to systemic, regional, domestic, and individual variables in the project's construction. At the systemic level, the United States' absence from global power contestations in infrastructure development encouraged the European Union to perceive China's involvement in the construction of the Pelješac Bridge as beneficial. At the regional level, the political conditions of the Western Balkans shaped the European Union's perception that no single actor opposes the construction of the Pelješac Bridge. At the domestic level, the European Union's interests on the Schengen area's connectivity and the expansion of the Trans-

European Network encouraged it to respond positively towards the planned functions of the Pelješac Bridge. At the individual level, the personal backgrounds of the European Commission's key actors encouraged the European Union to respond positively to their roles and contributions in the construction of the Pelješac Bridge. Therefore, the combined implications of all four variables motivated the European Union to fund the construction of the Pelješac Bridge. The findings of this thesis contribute towards a better understanding of the inconsistencies in the European Union's normative power.